BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia sebagai negara hukum" yang berarti membawa akibat yuridis bahwa segala penerapan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada Pancasila. Tujuannya agar dapat mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga dapat tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).

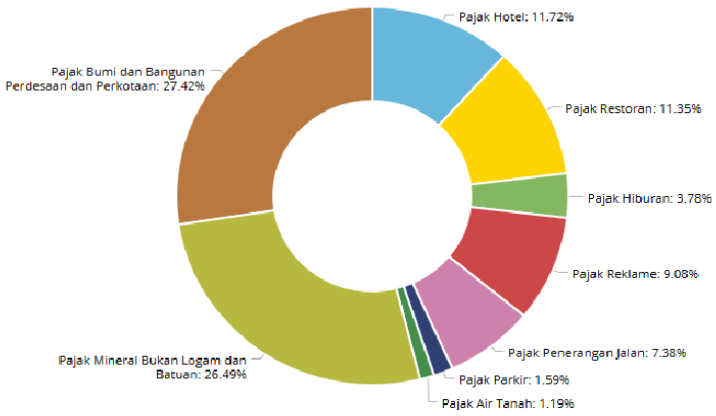
Sebagai suatu negara kesatuan tentunya Indonesia memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan umum bangsa Indonesia dalam hal ini telah secara eksplisit termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi; "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial" (Naskah UUD 1945).

Upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut, pemerintah gencar melakukan pembangunan dalam segala sektor. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa ini tentunya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Maka dalam hal ini sumber utama pemasukan dana pemerintah yang digunakan untuk pembangunan bangsa ini ialah dari masyarakat melalui iuran pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menunjang kehidupan sehari-hari.

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, masyarakat wajib membayarnya kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dengan diperuntukkan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Frelly Manurung, Sjamsi Pasandaran, 2018, hlm. 18). Salah satu faktor kemampuan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam hal ini, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah (Muhammadiyah, 2015, hlm. 83).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang kemudian disebut ialah kontribusi wajib kepada daerah yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dipergunakan untuk keperluan daerah. Menjadikan sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin pembangunan daerah dan diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Astutik, 2014, hlm. 47).



Digaram 1.1 Presentase Jenis Pajak Pendapatan Daerah Kota Bandung
Sumber: data.bdg.co.id

Pemerintah Kota Bandung dalam Pendapatan Asli Daerah yang sekitar 77,83% berasal dari pajak, dapat dilihat berdasarkan diagram diatas

sekitar 27,42% sumbangan pajak tersebut berasal dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB P2). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB P2) menjadi penyumbang tertinggi bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dibandingkan jenis Pajak yang lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat. PBB ialah pajak atas kepemilikan harta bumi dan bangunan yang dikenakan oleh pemerintah dan merupakan harta berwujud tak bergerak yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penerimaan PBB dapat menjadi sumbangan dalam biaya pembangunan daerah guna mewujudkan dan memenuhi kepentingan masyarat di setiap daerah (Roesma, 2013, hlm. 2). Maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tolok ukur besar kecilnya pendapatan asli daerah.

Kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting. Kesadaran hukum berpegang pada cara yang dilakukan setiap orang dalam meyadari apa yang seyogyanya harus dilakukan dalam memahami dan mematuhi hukum. Kesadaran hukum pada masyarakat identik dengan ketaatan masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku (Soekanto, 2012, hlm. 251).

Sistem pembayaran pajak di Indonesia saat ini salah satunya menganut *self assestment system* dalam sistem perpajakan ini dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam memenuhi dan melaksakan kewajibannya dalam hak perpajakannya. Seperti pelaporan jumlah pajak yang terutang hingga wajib pajak dapat membayarnya sesuai dengan ketentuan (Supriyanto, 2011, hlm. 7). Saat ini menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap negara *(civic*

partisipation). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab menjalankan kewajibannya salah satunya ialah dengan membayar PBB.

Implementasi pembayaran PBB dengan menggunakan *Official Assessment System* perlu ditinjau efektivitasnya mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pendapatan pajak yang memberikan presentase yang sangat tinggi. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang harus diukur efektivitasnya. Besarnya pajak Bumi dan Bangunan di sampaikan melalui SPPT yang didistribusikan dari kecamatan, kelurahan, ketua RW/RT baru diterima oleh wajib pajak, dalam prakteknya ada beberapa kendala salah satunya adalah waktu penerimaan SPPT kepada wajib pajak, yang seharusnya pada awal tahun wajib pajak berkeinginan membayar namun dia belum mendapatkan SPPT sehingga harus menundanya bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak mendapatkan SPPT seperti yang semestinya (Pamungkas et al., 2017, hlm. 20).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau yang memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau yang memperoleh manfaat bangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditentukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh wajib pajak, tanpa memperhatikan apakah subyek pajak mampu atau tidak mampu untuk membayarnya. Oleh sebab itulah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebut juga pajak obyektif karena penentuan besarnya pajak terhutang semata-mata hanya memperhatikan obyek pajaknya saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan subyek pajak.

Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Adelina (2013, hlm. 1) dengan judul Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB dan untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB sangat efektif dan kontribusi sangat kurang.

Kelurahan Pasirbiru, merupakan salah satu daerah di Kota Bandung yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak daerah. Dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya. Dalam penarikan PBB masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) *double*, juga adanya WP (wajib pajak) yang tidak taat atau dalam kata lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa target dan realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, mengalami kenaikan dan penurunan bahkan target tidak tercapai. Seperti pada data pendapatan pembayaran PBB sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PBB Kecamatan Cibiru

No	Kelurahan	Jumlah SPPT	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Ket.
1	Pasirbiru	3061	744.471.785	474.098.735	362720397	0,6801
2	Cipadung	4285	2144849353	2585281919	-440.432.566	1,2053
3	Palasari	5391	1700336818	1434298701	266038117	0,8435
4	Cisurupan	6381	2153431162	1434298701	435789993	0,7976
Jumlah		18629	7132334359	6508218418	624115941	0,9125

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Kelurahan Pasirbiru terdapat jumlah penduduk 13. 334 jiwa, dengan jumlah wajib pajak ialah 3.061. Berdasarkan tabel di atas target pendapatan pembayaran PBB pada tahun 2017 sebesar 744.471.785 namun realisasi yang tercapai ialah 474.098.735 atau 1.856 transaksi wajib pajak (60,63%) sehingga

terdapat sisa 270.373.050. Berdasarkan fakta tersebut maka dalam hal ini realisasi pembayaran PBB belum mencapai target yang semestinya. Selain mengelola besarnya PBB, pemerintah Kelurahan Pasirbiru juga perlu mengetahui tingkat efektivitas *official assessment system* sebagai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengankat judul "Efektivitas *Official Assessment System* Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung)".

1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan satu permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas penerapan *official assessment system* sebagai sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung**".**

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung?
2. Bagaimana efektivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadraan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai efektivitas *official assessment system* pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasirbiru.

2. Tujuan Khusus
   a. Untuk mendeskripsikan mengenai implementasi *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung.
   b. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *official assessment system* dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung.
   c. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadraan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat dari Segi Teori

Adanya penelitian mengenai sesuatu tentu memiliki hal yang ingin dicapai. Salah satunya dengan adanya manfaat dari hasil penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk peneliti saja, melainkan juga agar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memperkaya keilmuan sosial khususnya memberikan informasi mengenai arti penting memiliki kesadaran hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Manfaat lainnya yaitu semoga hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga luaran dari penelitian ini semakin kaya dan semakin berkembang sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Melaksanakan ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan ini wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban seluruh warga negara dan hal ini telah diatur dalam undang-undang.

3. Manfaat dari Segi Praktik

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

a. Manfaat bagi Peneliti
   1) Sebagai suatu pembelajaran dan menjadi bahan masukan berupa ilmu pengetahuan mengenai *official assessment system* sebagai sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan.
   2) Sebagai bekal dalam mengembangkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.
   3) Peneliti yang memiliki ketertarikan mengenai sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat melanjutkan penelitian ini sebagai acuan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat bagi Wajib Pajak
   1) Untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
   2) Sebagai sarana informasi mengenai peran penting wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Manfaat bagi Pemerintah

   Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penagihan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Manfaat bagi Akademisi
   1) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai *official assessment system* yang merupakan salah satu sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
   2) Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

4. **Manfaat dari segi Isu serta Aksi Sosial**
    a. Diharapkan dapat membuat program *project* sosial di masyarakat, institusi pemerintah dan lainnya dengan mengintegrasikan dalam kegiatan pemerintah atau kegiatasn sosial lainnya untuk menumbuhkan kesadaran hukum warga negara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
    b. Diharapkan dapat menghimpun banyak *volunteer* dan relawan yang ingin berkontribusi dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum warga negara, khususnya para penegak hukum sebagai upaya pendidikan hukum bagi masyarakat baik berupa pembinaan, pemberdayaan ataupun bekerjasama dengan instansi perpajakan memiliki narasumber yang relevan dan memiliki pengalaman secara langsung berinteraksi dengan para fiscus.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul**,** pengesahan, ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran,

Adapaun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan**

    Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

2. **BAB II Kajian Pustaka**

    Bab ini berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan sesuai bidang yang diteliti, posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. **BAB III Metode Penelitian**

   Bab ini berisi tentang desain penelitian yang digunakan, rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

4. **BAB IV Temuan dan Pembahasan**

   Bab ini membahas tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. **BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

   Bab ini berisi tentang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.